

## INDUSTRI &amp; PERDAGANGAN

## November 2024, Harga Referensi CPO Naik 7,65 Persen

Jakarta - Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau pungutan ekspor (PE), periode November 2024 ditetapkan sebesar USD961,97/MT. Nilai ini naik USD68,32 atau 7,65 persen dari periode Oktober 2024 yang tercatat sebesar USD 893,64/MT.

## NERACA

Penetapan tersebut tertancup dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1532 tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sementara itu, penetapan BK CPO November 2024 merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 sebesar USD124/MT. Sedangkan, penetapan PE CPO merujuk pada lampiran I PMK Nomor 62 Tahun 2024 sebesar 7,5 persen yaitu sebesar USD72-1475/MT.

"Saat ini, HR CPO meningkat menaiki ambang batas USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 124/MT dan PE CPO sebesar 7,5 persen dari HR CPO November 2024 yaitu sebesar USD 72,1475/MT," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim.

Isy menerangkan, sumber penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga dalam periode 25 September-24 Oktober 2024 pada bursa CPO Indonesia

sebesar USD904,60/MT, bursa CPO Malaysia sebesar USD1.019,33/MT, dan pasarlelang CPO Rotterdam sebesar USD1.153,64/MT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2022, jika terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga bursa lebih dari USD40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dua sumber harga yang menjadi median.

Sumber harga terdekat dari median adalah Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai dengan perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar USD 961,97/MT.

"Peningkatan HR CPO ini dipengaruhi peningkatan permintaan terutama dari India dan Tiongkok. Namun, produksi global turun akibat kemarau panjang.

Selain itu, peningkatan harga minyak mentah dunia dan tarif Bea Keluar Malaysia yang berlaku sejak 1 Oktober 2024 turut menggerak HR CPO," jelas Isy. Selanjutnya, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto & 25 kilogram (kg) dikenakan BK USD 31/MT.

Penetapan merek tersebut tertancup dalam Ke-

putusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 1533 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto & 25 kg.

Sebelumnya, HR komoditas minyak kelapa sawit CPO untuk penetapan BK dan tarif BLU BPDP-KS, atau dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), periode 1-31 Oktober 2024 adalah sebesar USD893,64/MT. Nilai ini meningkat sebesar USD5-4,11 atau 6,45 persen dari periode September 2024 yang tercatat sebesar USD-839,53/MT.

Lebih lanjut, terkait minyak goreng, Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemas dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR).

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 mengatur skema domestik market obligation (DMO) Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk MINYAKITA.

Permendag 18 Tahun 2024 ini mulai berlaku pada 14 Agustus 2024. Permendag Nomor 18 Tahun 2024 diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan MINYAKITA sebagai strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi.

MINYAKITA kini menjadi pilihan minyak goreng kemasan yang banyak diminati masyarakat, selain minyak goreng dengan jenama premium.

MINYAKITA bukan merupakan minyak goreng subsidi pemerintah, melainkan kontribusi pelaku

usaha eksportir produk turunan kelapa sawit ke pasar dalam negeri melalui skema DMO. Berdasarkan kajian Kementerian Perdagangan (Kemendag), penyaluran DMO harus kembali ditingkatkan karena berdampak baik terhadap stabilitas harga minyak goreng. Setiap pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit yang membutuhkan Hak Ekspor perlu mendistribusikan MGR dalam bentuk MINYAKITA. Hak Ekspor digunakan sebagai syarat penyerahan Persetujuan Ekspor.

MGR dapat diakui menjadi Hak Ekspor jika telah diterima di Distributor Pertama (D1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, atau diterima di Distributor Kedua (D2) atau pengecer apabila tidak melalui distributor BUMN Pangan yang dibuktikan dengan pelaporan di sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemendag) Putu Juli Ardika mengungkapkan, Kemendag juga telah berhasil menormalisasi tata kelola produksi distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) pada masa outbreak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

"Kemendag telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan mendukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, berbasis peran serta masyarakat secara massif," pungkash Putu. ●



NERACA/Antarfoto/M Risyah Hidayat/YU

**PERTUMBUHAN WARALABA DI INDONESIA** : Sejumlah pengunjung memesan minuman di salah satu waralaba di pusat perbelanjaan di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (30/10/2024). Menurut data dari Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), pertumbuhan waralaba di Indonesia hingga tahun 2023 tercatat 60 ribu gerai yang beromzet sekitar Rp200 juta.

## Investasi Produksi Daging dan Susu Dikawal

## NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kemantan) terus mendorong peningkatan produksi daging dan susu sapi melalui pengawasan investasi.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyatakan bahwa upaya mendatangkan investor untuk membangun industri sapi perah dan sapi potong menjadi langkah kunci untuk mencapai swasembada. "Untuk swasembada daging dan susu, kita tidak bisa hanya mengandalkan indukan yang ada. Diperlukan sapi baru dari investor dalam dan luar negeri," jelas Sudaryono atau yang biasa disapa Mas Dar, di Jakarta.

Mas Dar pun menekankan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor susu atau sapi melalui APBN, melainkan membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi.

Menurutnya, Kemantan hanya memberikan asistensi dan menyiapkan lahan bagi perusahaan yang ingin membangun industri ini.

"Yang imporkan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kemantan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan," ujar

## Mas Dar.

Mas Dar juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkemampuan mendatangkan sapi, dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor, terdiri dari 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa Kemantan akan terus mendorong agar hal tersebut realisasi.

"Setiap perusahaan berbeda-beda. Adanya rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi," ungkap Mas Dar.

Selain itu, Mas Dar berharap peningkatan produksi daging dan susu ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan kedatangan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi," kata Mas Dar.

Mas Dar juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor susu dari Vietnam, melainkan mengajak investor dari negara tersebut untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Sebelumnya saat Mas

Dar di Bandung mengaku optimis Indonesia mampu mewujudkan swasembada susu dan daging sapi dalam waktu yang tidak lama.

"Jadi ini sangat mengembirakan secara kemampuan kita mampu (swasembada) karena itu nanti kita akan laporkan kepada Pak Menteri, tentu kita laporkan kepada Presiden Pak Jokowi dan juga kita laporkan kepada Presiden berikutnya bahwa ke depan harus ada keputusan politik agar kita tidak impor," ujar Mas Dar.

Mas Dar mengatakan sampai saat ini total kemampuan produksi sperma yang dilakukan Kemantan mencapai 10,4 juta paket. Semua paket tersebut bahkan sudah siap pakai alias bisa disuntikkan langsung kepada sapi indukan.

"Ini merupakan kabar yang mengembirakan dan juga mohon diberitakan bahwa Kementerian Pertanian melalui Balai Inseminasi Buatan mampu menyediakan 10,4 juta Inseminasi Buatan," kata Mas Dar.

Menurut Mas Dar produksi sperma yang dilakukan saat ini juga telah didukung dengan teknologi dan kemampuan SDM yang mumpuni di bidang peternakan sehingga kedepan langkah yang perlu dilakukan adalah komitmen bersama dan dukungan

dari semua pihak terhadap kemampuan produksi dalam negeri agar terus meningkat.

"Secara teknologi dan secara SDM kita mampu membuat inseminasi buatan yang baik. Inseminasi buatan kita mampu, teknologinya mampu, alatnya ada, pengawasan ada, produksi mampu dan semua kita bisa," jelas Mas Dar.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, Kemantan akan memastikan kenyamanan bagi investor dalam sektor pertanian untuk mendorong realisasi investasi yang cepat.

Sehingga dengan langkah ini, pihaknya optimis dapat memenuhi kebutuhan daging dan susu domestik serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Jangan kita persulit investor supaya mereka nyaman investasi di Indonesia. Kata kuncinya adalah beri kenyamanan investor, khususnya sektor pertanian, kami yang kawal masuk," ungkap Amran.

Kemantan sendiri menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. ●

## November 2024, Harga Referensi Kakao Sebesar USD 7.448,02/MT

## NERACA

Jakarta - Harga Referensi (HR) biji kakao periode November 2024 ditetapkan sebesar USD 7.448,02/MT, turun USD133,48 atau 1,76 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada November 2024 menjadi USD 7.037/MT, turun USD 130 atau 1,81 persen dari periode Oktober 2024.

Penurunan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yang tetap sebesar 15 persen sesuai Kolom

4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024.

"Penurunan HR dan HPE biji kakao di antaranya dipengaruhi peningkatan produksi, terutama negara-negara di wilayah Afrika Barat, akibat cuaca yang mulai kondusif. Namun, tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan," jelas irektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim.

Sebelumnya, pada bulan Oktober HR biji kakao di-

tetapkan sebesar USD-7.581,49/MT, turun sebesar USD 335,42 atau 4,24 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Oktober 2024 menjadi USD 7.167/MT, turun USD 311 atau 4,16 persen dari periode sebelumnya.

Lebih lanjut terkait kakao, Ketua Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdollah mengungkapkan harga biji kakao di tahun ini akan bertahan di angka USD 4000/ton atau sekitar Rp-60.000/kilogram (kg).

Setidaknya harga ini merupakan peningkatan dari harga tahun sebelumnya USD2.500/ton. Sehingga ini menjadi sinyal menarik bagi petani untuk mengembangkan kakao.

"Sementara itu kebutuhan dalam negeri cukup tinggi. Jika kita menggarap kakao 10.000 hektar (ha) kakao dengan asumsi 1 ton hanya bisa mendapatkan 10.000 ton. Sehingga peluang sangat besar, pasar sangat terbuka dan peluang untuk pengembangan kakao untuk menutupi impor kakao," jelas Soetanto. ●



**PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.**  
— A MEMBER OF HENGSTONG GROUP —

**PENGUMUMAN**  
**RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN I**  
**TAHAP II TAHUN 2023**  
**PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.**

PT Voksel Electric Tbk, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Gedung Menara Karya Lantai 3 unit D, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950, dengan ini mengumumkan:

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023 No. 4 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta ("PWA Obligasi I Tahap II"), PT Voksel Electric Tbk ("Perseroan") telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi;
- Bahwa, sesuai dengan POJK Nomor 20/2020 Pasal 17 Ayat (1) dan pasal 5 ayat 12 butir c Obligasi I Tahap II, yang menyebabkan: Perseroan dapat melakukan Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Perseroan, selaku penerbit menyampaikan pemberitahuan atas rencana kami untuk melakukan Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023 dengan detail pelaksanaan sebagai berikut:

- Rencana pelunasan pada tanggal 11 November 2024;
- Jumlah dana maksimal dan kisaran Jumlah Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun yang akan digunakan untuk pembelian kembali adalah sejumlah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan tersebut;
- Perhitungan Bunga Obligasi sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali akan ditentukan berdasarkan perhitungan dari KSEI selaku Agen Pembayaran.
- Perhitungan yield Obligasi sebesar 2% (dua persen);
- Harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023 adalah 100% dari nilai pokok Obligasi, yakni Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
- Transaksi akan dilakukan melalui KSEI, dimana dana Pembelian Kembali Obligasi selambat-lambatnya akan diterima secara *good fund* di rekening yang ditunjuk KSEI pada H-1 dari Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali dan akan didistribusikan kepada pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
- Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023 merupakan pelunasan dan tidak akan diterbitkan kembali.
- Tata Cara Pembelian Kembali Obligasi adalah sebagai berikut:
  - Pemegang Obligasi mengisi dan menandatangani surat penawaran jual, dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penawaran jual Obligasi.
  - Pemegang Obligasi menginformasikan mengenai keikutsertaannya dalam penawaran jual ini kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
  - Pemegang Obligasi menyampaikan surat penawaran jual kepada Emiten, dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penawaran jual Obligasi.
  - Pemegang Obligasi menyampaikan pengajuan instruksi pembelian kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
  - Sehubungan dengan Pembelian Kembali yang dilaksanakan, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Sub Rekening Efek Pemegang Obligasi PT Voksel Electric Tbk berada, wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk melakukan pelaporan melalui sistem PLTE (Penerima Laporan Transaksi Efek).
  - Pemegang Obligasi yang mengikuti Pembelian Kembali ini agar menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk melakukan pemindaian Obligasi dari sub rekening pemegang Obligasi ke dalam rekening lampungan KSEI.
- Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi adalah sebagai berikut:
 

No.	Tata Cara Pembelian Kembali Obligasi	Tanggal
1.	Penyampaian Surat Pemberitahuan Rencana Pembelian Kembali Kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. selaku Wali Amanat.	29 Oktober 2024
2.	Penyampaian Surat Pemberitahuan Rencana Pembelian Kembali kepada KSEI dan Pengumuman	1 November 2024
3.	Periode Penawaran Pembelian Kembali Obligasi	4 – 5 November 2024
4.	<i>Good fund</i> dana untuk Pembelian Kembali di KSEI	8 November 2024
5.	Eksekusi pelunasan dilakukan oleh KSEI	11 November 2024
6.	Penyampaian pemberitahuan hasil pelaksanaan Pembelian Kembali kepada OJK dan Wali Amanat	13 November 2024

10. Tidak ada hubungan afiliasi antara PT Voksel Electric Tbk dengan pemegang obligasi

Demikian pengumuman pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023.

Jakarta, 1 November 2024  
PT Voksel Electric Tbk.



**PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.**  
— A MEMBER OF HENGSTONG GROUP —

**PENGUMUMAN**  
**RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN**  
**II TAHAP I TAHUN 2023**  
**PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.**

PT Voksel Electric Tbk, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Gedung Menara Karya Lantai 3 unit D, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950, dengan ini mengumumkan:

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 No. 13 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya ("PWA Obligasi II Tahap I"), PT Voksel Electric Tbk ("Perseroan") telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi;
- Bahwa, sesuai dengan POJK Nomor 20/2020 Pasal 17 Ayat (1) dan pasal 5 ayat 12 butir c PWA Obligasi II Tahap I, Perseroan dapat melakukan Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Perseroan, selaku penerbit menyampaikan pemberitahuan atas rencana kami untuk melakukan Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 dengan detail pelaksanaan sebagai berikut:

- Rencana pelunasan pada tanggal 11 November 2024;
- Jumlah dana maksimal dan kisaran Jumlah Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun yang akan digunakan untuk pembelian kembali adalah sejumlah Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan tersebut;
- Perhitungan Bunga Obligasi sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali akan ditentukan berdasarkan perhitungan dari KSEI selaku Agen Pembayaran.
- Perhitungan yield Obligasi sebesar 2% (dua persen);
- Harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 adalah 100% dari nilai pokok Obligasi, yakni Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- Transaksi akan dilakukan melalui KSEI, dimana dana Pembelian Kembali Obligasi selambat-lambatnya akan diterima secara *good fund* di rekening yang ditunjuk KSEI pada H-1 dari Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali dan akan didistribusikan kepada pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
- Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 merupakan pelunasan dan tidak akan diterbitkan kembali.
- Tata Cara Pembelian Kembali Obligasi adalah sebagai berikut:
  - Pemegang Obligasi mengisi dan menandatangani surat penawaran jual, dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penawaran jual Obligasi.
  - Pemegang Obligasi menginformasikan mengenai keikutsertaannya dalam penawaran jual ini kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
  - Pemegang Obligasi menyampaikan surat penawaran jual kepada Emiten, dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penawaran jual Obligasi.
  - Pemegang Obligasi menyampaikan pengajuan instruksi pembelian kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
  - Sehubungan dengan Pembelian Kembali yang dilaksanakan, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Sub Rekening Efek Pemegang Obligasi PT Voksel Electric Tbk berada, wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk melakukan pelaporan melalui sistem PLTE (Penerima Laporan Transaksi Efek).
  - Pemegang Obligasi yang mengikuti Pembelian Kembali ini agar menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk melakukan pemindaian Obligasi dari sub rekening pemegang Obligasi ke dalam rekening lampungan KSEI.
- Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi adalah sebagai berikut:
 

No.	Tata Cara Pembelian Kembali Obligasi	Tanggal
1.	Penyampaian Surat Pemberitahuan Rencana Pembelian Kembali Kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. selaku Wali Amanat.	29 Oktober 2024
2.	Penyampaian Surat Pemberitahuan Rencana Pembelian Kembali kepada KSEI dan Pengumuman	1 November 2024
3.	Periode Penawaran Pembelian Kembali Obligasi	4 – 5 November 2024
4.	<i>Good fund</i> dana untuk Pembelian Kembali di KSEI	8 November 2024
5.	Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali	11 November 2024
6.	Penyampaian pemberitahuan hasil pelaksanaan Pembelian Kembali kepada OJK dan Wali Amanat	13 November 2024

10. Tidak ada hubungan afiliasi antara PT Voksel Electric Tbk dengan pemegang obligasi

Demikian pengumuman pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023.

Jakarta, 1 November 2024  
PT Voksel Electric Tbk.